

Nomor : KSEI-26776/JKU/1125 7 November 2025

Lampiran : 1 (satu) set dokumen

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal: Undangan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) PT Pyridam Farma Tbk

Sebagai tindak lanjut informasi PT Bank KB Indonesia Tbk 7 November 2025 selaku Wali Amanat Obligasi dan PT Pyridam Farma Tbk, bersama ini terlampir disampaikan Undangan RUPO Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari Kadiv. Jasa Kustodian AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

- 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
- 2. Direksi PT Pyridam Farma Tbk;
- 3. Direksi PT Bank KB Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.



PT Bank RB Indonesia Tok KB Bank Head Office, JL MT, Haryono Kav, 50–51 Jakarta Selatan – Indonesia 12770 P. (+62)21 7988266, 7989837 www.kbbank.co.id

Jakarta, 07 November 2025

No

: 27546 /CMSF/XI/2025

Lampiran

: -

Perihal

: Undangan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Pyridam

Farma Tahap III Tahun 2024

Kepada Yth. :

Pemegang Obligasi di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselengarakannya Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 ("RUPO"), PT Bank KB Indonesia Tbk selaku Wali Amanat atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 ("Obligasi") mengundang Bapak / Ibu untuk hadir dalam acara RUPO yang dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal: Jumat, 21 November 2025

Waktu

: 14.00 WIB - Selesai

Tempat

: PT Pyridam Farma Tbk

Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lt 12, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 21

Jakarta Selatan

Agenda RUPO:

- 1. Perubahan penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024
- 2. Perubahan Pasal 2.1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 27 tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 02 tanggal 13 Februari 2024 ("PWA") terkait dengan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi serta pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan perubahan Pasal 2.1 PWA (apabila ada);
- 3. Perubahan informasi mengenai Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 pada bagian resital dan Pasal 1 angka 26 PWA;
- 4. Perubahan Pasal 5.3 PWA terkait dengan jangka waktu Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024; dan
- 5. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan agenda nomor 1 sampai dengan 4 di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami sudah mengirimkan surat



PT Bank KB Indonesia TDK
KB Bank Head Office, JL, MT. Haryono Kav, 50–51 Jakarta Selatan – Indonesia 12770
P. (+62)21 7988266, 7989837
P. (+64)21 7988266, 7989837

permohonan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar dapat memberikan Konfirmasi Tertulis (KTUR) kepada Pemegang Rekening dengan *recording date* sesuai ketentuan yang berlaku pada KSEI serta melakukan pembekuan atas Obligasi sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yaitu tanggal 21 November 2025

Catatan

- 1. RUPO ini diselenggarakan atas usulan PT Pyridam Farma Tbk. selaku Emiten.
- 2. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR") dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
- 3. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi).
- 4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 tidak tercapai, maka wajib dilaksanakan RUPO yang kedua. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 5. Para Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI;
 - b. Fotokopi bukti diri (KTP atau paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO;
 - c. Asli surat kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya);
 - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - (i) Asli surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
 - (ii) Fotokopi bukti diri pemberi dan penerima kuasa (KTP atau paspor yang masih berlaku).
 - (iii) Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - f. Surat pernyataan dari Pemegang Obligasi yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten;





PT Bank KB Indonesia Tbk KB Bank Head Office, Jl, MT. Haryono Kav, 50–51 Jakarta Selatan – Indonesia 12770 P. (+62)21 7988266, 7989837. www.kbbank.co.ld

- 6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
- 7. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT Bank KB Indonesia, Tbk

Capital Market Service & Financial Institution Department

Chandra Ginanjar Pratama

Department Head

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Lotte Siap Wujudkan Kemandirian Energi di Indonesia

NERACA

Cilegon - Setelah melalui proses panjang dan upaya terukur serta berkelanjutan guna memperkuat industri nasional serta kemandirian energi, Pemerintah akhirnya menuntaskan salah satu tonggak penting program hilirisasi minyak dan gas bumi (migas). Sebuah pabrik petrokimia terintegrasi kini berdiri di Cilegon, Banten. Bukti bahwa keberhasilan Indonesia mengolah kekayaan sumber daya alamnya sendiri.

Keberhasilan ini menjadi cerminan nyata dari arah kebijakan pemerintah yang menjadikan hilirisasi sebagai prioritas utama dalam program Asta Cita. Komitmen tersebut secara konkret diwujudkan lewat peresmian Pabrik New Ethylene Project milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di Cilegon.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran investasi dan program hilirisasi dapat membantu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Hari ini, Lotte, perusahaan salah satu terbesar di dunia, mungkin asetnya

Jakarta - Implementasi

Peraturan Presiden Nomor

94 Tahun 2025 tentang La-

yanan Digital Terpadu pa-

da Komoditas Mineral dan

Batubara (SIMBARA) di Ja-

karta, Rabu (29/10). Pelak-

sanaan Perpres Nomor 94

Tahun 2025 merupakan

tonggak penting dalam

memperkuat tata kelola

dan optimalisasi peneri-

maan negara dari sektor

mineral dan batubara (mi-

nerba) secara terintegrasi,

transparan,dan akuntabel

"Melalui SIMBARA,

pemerintah membangun

sistem layanan digital ter-

padu yang menghubung-

kan data, kebijakan, dan

pengawasan antar Kemen-

terian/Lembaga untuk

memastikan transparansi

dan kepatuhan pelaku us-

aha di sektor minerba," ujar

Deputi Bidang Koordinasi

lintas sektor.

NERACA

USD100 miliar dan mereka investasi di kita sebesar Rp65 triliun. Terima kasih, saya bangga. Mudah-mudahan Saudara di sini berhasil. Kita wajib mengamankan, menjaga semuanya karena ini membawa manfaat sangat besar bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Proyek yang mulai digagas sejak 2016 ini menghabiskan investasi sekitar USD3,9 miliar atau sekitar Rp62,4 triliun. Proyek ini menandai hadirnya kembali pembangunan kompleks Naphtha Cracker di Indonesia setelah sekitar

Sempat mangkrak selama 5 tahun, namun berkat inisiatif dan terobosan dari Menteri Bahlil yang kala itu menjabat sebagai Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kendala terkait proses penyediaan lahan akhirnya bisa diselesaikan. Demikian pula halnya dengan kemudahan investasi, mulai dari penyederhanaan perizinan hingga pemberian insentif yang kompetitif.

Hingga akhirnya pada April 2022 proses pembangunan pabrik berhasil dimulai dan bisa beroperasi sejak Oktober 2025. Ketika berproduksi penuh, fasilitas ini diperkirakan menghasilkan 15 produk petrokimia hilirisasi migas

Komoditas Minerba yang Transparan

Energi dan Sumber Daya

Mineral Kementerian Ko-

ordinator Bidang Pereko-

BARA bukan hanya ten-

tang integrasi sistem digi-

tal antar kementerian, te-

tapi juga penyelarasan ke-

bijakan lintas sektor agar

pélaksanaannya terpadu

pentingnya setiap Kemen-

terian/Lembaga segera

menyusun rencana aksi

implementasi yang kon-

kret untuk pelaksanaan

Perpres Nomor 94 Tahun

2025, mencakup integrasi

proses bisnis internal dan

antarsektor. Sesuai amanat

dalam Perpres Nomor 94

Tahun 2025, tokus tahun

2025 pada lima komoditas

utama yaitu batubara, ni-

kel, timah, bauksit, dan

tembaga, sebelum diper-

luas ke komoditas lainnya

Elen juga menekankan

dan berjalan efektif.

Implementasi SIM-

nomian Elen Setiadi.

SIMBARA Ciptakan Tata Kelola

senilai sekitar USD2 miliar per tahun, terdiri atas USD1,4 miliar substitusi impor dan USD600 juta tambahan ekspor, sehingga turut memperkuat neraca perdagangan sektor industri kimia nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa fasilitas ini merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara dan akan memproduksi etilena, propilena, beserta berbagai produk turunannya, bahan baku penting bagi banyak industri domestik.

"Kalau dalam kurs sekarang sudah mencapai sekitar Rp63-64 triliun, dan menjadikannya salah satu investasi petroleum terbesar di Asia Tenggara. Jadi proyek ini terbesar di Asia Tenggara, mereka punya juga ada Lotte di Malaysia, tapi di sini yang paling besar," ujar Bahlil.

Dari sisi lapangan kerja, proyek ini memberikan dampak signifikan. Selama tahap konstruksi dan operasional diperkirakan menyerap sekitar 40 ribu tenagakerja, baiklangsung maupun tidak langsung.

Kehadiran pabrik diharapkan mengurangi ketergantungan impor produk petrokimia yang selama ini mencapai sekitar 50 persen, sekaligus memperkuat ketersediaan bahan baku industri hilir dalam negeri.●gro

SIMBARA akan menja-

di terobosan besar refor-

masi transparansi rantai

pasok komoditas mineral

dan batubara (minerba)

dengan mekanisme Auto

Blocking System (ABS) ba-

gi perusahaan yang me-

langgar kewajiban terkait

pemeliharaan lingkungan,

izin pemakaian kawasan

hutan, atau ketenagaker-

jaan. SIMBARA juga telah

mengadopsi traceability

framework dari Interna-

tional Energy Agency (IEA)

dan OECD, menjadikan-

nya acuan bagi rantai pa-

SIMBARAsejaktahun 2022

telah menunjukkan dam-

pak positif terhadap pe-

ningkatan kepatuhan/me-

nurunkan pelanggaran wajib bayar dan / atau pe-

laku usaha terkait dalam

pemenuhan kewajiban

pembayaran PNBP. gro

Implementasi awal

sok global.



PRODUKSI BUMBU RENDANG UNTUK EKSPOR: Juru masak mengaduk kalio untuk diolah menjadi bumbu rendang, di dapur Sentra Rendang Padang, Sumatera Barat, Kamis (6/11/2025). Koperasi Produsen Wanita (Kopwan) Ikaboga memproduksi sedikitnya setengah ton bumbu rendang bersertifikat halal untuk diek-

Pertumbuhan Manufaktur Melebihi Ekonomi Nasional

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin merilis bahwa manufaktur atau sektor Industri Pengolahan Non Migas (IP-NM) kembali menunjukkan kinerja positif dan tetap menjadi motor utama penggerak perekonomian nasional. Pada triwulan III tahun 2025, manufaktur tumbuh sebesar 5,58 persen (y on y), kembali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen (y on y).

■ NERACA

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mennegaskan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur pada triwulan III tahun 2025 kembali lebih tinggidaripertumbuhan ekono-

mi nasional. "Pada kuartal II 2025 sebelumnya, pertumbuhan manufaktur 5,60 persen (y on y) dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen (y on y). Hal ini mencerminkan daya saing manufaktur nasional yang semakin kuat, baik di pasar domestik maupun ek-

spor," ujar agus di Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 17,39 persen pada triwulan III tahun 2025, menjadikannya penyumbang terbesar terhadap PDB nasional dibandingkan sektor lainnya. Kontribusi ini juga meningkat sebesar 0,47 persen dibanding kuartal sebelumnya sebesar 16,92 per-

"Manufaktur kembali menjadi penggerak utama perekonomian nasional pada kuartal III 2025 yang ditunjukkan oleh kontribusi terhadap PDB nasional dan juga terhadap pertumbuhekonomi nasional. Kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional naik sebesar 0,47 persen dari 16,92 persen menjadi 17,39 persen pada kuartal III 2025. Sedangkan, kontribusi manufaktur terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi sebesar 1,13 persen (y-ony). Artinya, sektor ini tetap menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional yang memberikan nilai tambah besar, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat struktur ekonomi

nasional," imbuh Agus.

Industri Pertumbuhan manu-

Pertumbuhan Subsektor

faktur pada triwulan III-2025 ditopang oleh meningkatnya permintaan baik dari pasar domestik maupun luar negeri. Sejumlah subsektor industri bahkan menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Industri makanan dan minuman tumbuh 6,49 persen, terutama didorong oleh peningkatan produksi Crude Palm Oil (CPO) dan produkturunannya.Sementara itu, industri logam dasar mencatat lonjakan pertumbuhan hingga 18,62 persen, sejalan dengan meningkatnya permintaan ekspor untuk produk logam dasar, khususnya besi dan baja.

Selanjutnya, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh sebesar 11,65 persen, didorong oleh kenaikan produksi bahan kimia dan barang kimia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor.

Begitu juga dengan subsektor industri mesin dan perlengkapan serta subsektor industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan juga mengalami pertumbuhan berturut-turut sebesar 11,74 persen dan 16,30 persen.

"Pertumbuhan yang solid di berbagai subsektor

Tingginya Permintaan, Dongkrak HPE Konsentrat Tembaga di November 2025

ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam mendorong industrialisasi sumber daya alam, perlindungan pasar domestik dari gempuran banjir produk impor, penguatan teknologi produksi, pengembangan tenaga kerja industri dan memperkuat ekosistem rantai pasok nasional telah berjalan efektif. Ke depan, kami akan terus memperkuat kebijakan yang berbasis peningkatan produktivitas dan daya saing industri,"

Menurut Agus, Kementerian Perindustrian terus berkomitmen untuk menjaga momentum positif ini melalui berbagai program, termasuk Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN), pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengembangan industri halal, transformasi industri hijau serta dukungan pada investasi berorientasi ekspor dan inovasi teknologi ĥijau.

tegas Agus.

"Berkat arahan dan keberpihakan Bapak Presiden Prabowo pada industri dalam negeri, kerjasamaantar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, serta kolaborasi semua pihak dalam ekosistem industri maka pencapaian industri ini dapat diraih. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, kami optimistis sektor industri pengolahan akan terus tumbuh lebih kuat pada tahun ini dan menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045," jelas Agus.

Lebih lanjut, meskipun mengalami perlambatan tipis sebesar 0,53 poin dibandingkan Agustus 2025 yang berada di angka 53,55, namun capaian IKI September 2025 lebih tinggi 0,54 poin dibandingkan IKĪ September 2024 sebesar 52,48.

"Dari seluruh sektor yang kami analisis, yakni 23 subsektor industri, bahwa pada bulan Agustus lalu untuk indeks variabel produksi sebagian besar subsektor industri mengalami kontraksi, dengan rincian 19 subsektor yang kontraksi dan 4 subsektor yang ekspansi," kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif.

Febri mengemukakan, pada September 2025, untuk variabel produksi mengalami kenaikan signfikan. Terdapat 12 subsektor industri yang mengalami ekspansi, sedangkan yang kontraksi hanya 11 subsektor yang berada di posisi kontraksi. "Ini artinya, aktivitas produksi meningkat, karena juga adanya demand yang tinggi. Produksi yang membaik ini juga didukung karena faktor ketersediaan bahan baku dan teknologi," jelas Febri.●gro

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP III TAHUN 2024

di tahun 2026.

PT Bank KB Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amana atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 ("**Obligasi**") berdasarkan Akta Perjanjian atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Iahap III Iahun 2024 ("Obligasi") berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 27 tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 02 tanggal 13 Februari 2024, yang mana seluruhnya dibuat di hadapan M. Nova Faisal, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai "PWA"), dengan ini menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Perianijan Perwaliamanatan. Wal Amanat bersama ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") yang akan

Hari/Tanggal

Tempat

- PT Pyridam Farma Tbk
- Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lt 12, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 21 Jakarta

- Perubahan penggunaan dana Obligas
- Perubahan Pasal 2.1 PWA terkait dengan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi serta pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan perubahan Pasal 2.1 PWA (apabila ada);
- Perubahan informasi mengenai Obligasi pada bagian resital dan Pasal 1 angka 26 PWA; 4. Perubahan Pasal 5.3 PWA terkait dengan jangka waktu Obligasi; dan
- Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan agenda nomor 1 sampai dengan 4 di atas
- RUPO ini diselenggarakan atas usulan PT Pyridam Farma Tbk. selaku Emiten
- Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR") dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan:
- RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi).
- Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 tidak tercapai, maka wajib dilaksanakan RUPO yang kedua. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- Para Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI;
- Fotokopi bukti diri (KTP atau paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO;
- Asli surat kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya);
- Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhi serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak
- Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa (i) Asli surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh pengurus
 - yang berwenang mewakili (ii) Fotokopi bukti diri pemberi dan penerima kuasa (KTP atau paspor yang masih berlaku). (iii) Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus asuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak
- Surat pernyataan dari Pemegang Obligasi yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten; Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
- Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO. Jakarta, 07 November 2025



NERACA Jakarta - Harga Patokan

Ekspor (HPE) komoditas konsentrat tembaga (Cu' 15 persen) naik pada paruh pertama November 2025. HPE rata-rata ditetapkan sebesar USD 5.462,14 per Wet MetrikTon(WMT)ataunaik 15,10 persen dibandingkan paruh kedua September 2025 yang sebesar USD 4.745,52 per WMT.

Penetapan HPE dituangkan dalam "Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 2151 Tahun 2025 tentang HPE atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar". Kepmendag tersebut ditetapkan pada 4 November 2025 dan berlaku untuk periode 5-14 November

"Nilai HPE konsentrat tembaga naik dibanding paruh kedua September 2025 akibat meningkatnya permintaan global terhadap tembaga. Permintaan ini terutama untuk kebutuhan industri energi terbarukan, kendaraan listrik, dan manufaktur perangkat elektronik. Kenaikan HPE juga akibat fluktuasi nilai tukar dan gangguan produksi di sejumlah tambang besar dunia yang mengakibatkan jumlah pasokan terbatas," ungkap PelaksanaTugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana. Tommy menambah-

kan, kenaikan harga logam di pasar global turut memengaruhi peningkatan HPE komoditas tembaga. Pada periode pertama

November 2025, harga tembaga naik 9,45 persen, emas naik 18,86 persen, dan perak naik 27,81 persen dibandingkan paruh kedua September 2025. Kenaikan harga logam terjadi karena meningkatnya minat investor terhadap logam mulia sebagai aset lindung nilai. HPE konsentrat temba-

ga ditetapkan berdasarkan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ES-DM). Masukan teknis tersebut mengacu pada data London Metal Exchange (LME) untuk tembaga serta London Bullion Market Association (LBMA) untuk emas dan perak. Penetapan HPE dilaksanakan secara berkala, kredibel, dan transparan untuk memberikan

kepastian usaha bagi pelaku

"HPE ditetapkan melalui koordinasi antar instansi yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemendag, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian. Keterlibatan berbagai kementerian ini untuk memastikan bahwa penetapan HPE mencerminkan kondisi dan perkembangan pasar global secara objektif,"

ujar Tommy. Sebelumnya, KPE konsentrat periode kedua September 2025 ditetapkan sebesar USD 4.745,52 per Wet MetricTon(WMT).Angkaini naik 2,29 persen dibandingkan periode pertama September 2025yang tercatat USD 4.639,10 per WMT.

Tommy mengakui, kenaikan tersebut didorong tingginya permintaan global, terutama dari industri energi terbarukan seperti panel surya, kendaraan listrik, dan manufaktur perangkat elektronik.

Kenaikan ini didorong tingginya minat investor terhadap logam mulia sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global. "Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan mendorong kenaikan ratarata harga konsentrat tembaga pada periode kedua September 2025," ujar

Sedangkan HPE awal September 2025 rata-rata komoditas konsentrat tembaga (Cu 15 persen) pada periode pertama September2025 ditetapkan sebesar USD4.639,10 per Wet Metrik Ton (WMT).

Penetapan HPE sebagai acuan dalam perhitungan bea keluar (BK) dilakukan secara berkala dan transparan untuk memberi kepastian bagi pelaku usaha sektor pertambangan

Lebih lanjut terkait tambang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ES-DM), Bahlil Lahadalia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara profit dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

"Mineral dan batubara adalah salah satu komoditas unggulan ekspor kita. Sekalipun di dunia global sekarang sedang berbicara tentang energi baru terbarukan, ekspor batubara kita tetap salah satu yang terbesar, hampir 600 juta ton. Tetapi kita tidak boleh terlena, karena kita sudah punya target tahun 2060 Net

Zero Emission (NZE)," ujar

Bahlil. Bahlil juga menyampaikan bahwa capaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan hingga September 2024 telah mencapai 87,5 persen. "Saya juga bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini target daripada realisasi PNPB kita sudah mencapai 87,5 persen sampai dengan September. Mudah-mudahan bisa tercapai sesuai dengan target yang ada," kata Bahlil.

Selain itu, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, sektor pertambangan di Indonesia dituntut untuk menjalankan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Memang, sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun perlu diwaspadai dampak negatif yang ditimbulkan, terutama terhadap lahan pasca tam-

SURAT PERNYATAAN PERORANGAN

Saya yang bertai	nda tangan di bawah ini :
Nama	:
No KTP	:
No KTUR	:
Adalah sah selak sebesar Rp	ku Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024
Tbk. sebagai Perwaliamanatar tanggal 24 Jan Perwaliamantan 13 Februari 2024	menyatakan bahwa Saya Afiliasi / Bukan Afiliasi** dari PT Pyridam Farma penerbit yang mana telah didefinisikan di dalam Akta Perjanjian Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 27 uari 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 02 tanggal yang mana seluruhnya dibuat di hadapan M. Nova Faisal,SH.,M.Kn, Notaris n sebagai berikut:
horizontal m b. hubungan ar c. hubungan ar atau komisar d. hubungan ar mengendalik e. hubungan ar langsung, ol- f. hubungan ar Demikian Surat F	eluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara aupun vertikal; ntara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; ntara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi ris yang sama; antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, kan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; ntara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak eh pihak yang sama; atau ntara perusahaan dan pemegang saham utama. Pernyataan ini Saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. nber 2025
Materai 10000	
Nama :_	

^{**}Dapat dicoret salah satu

SURAT KUASA

Vana hartanda tangan di hawah ini, saya :

Tang bertanda tangan di bawan ini, saya .
Nama : NIK : Alamat :
Selaku Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 sebesar,
dengan ini memberikan KUASA kepada : Nama : NIK : Alamat : selanjutnya disebut "PENERIMA KUASA"

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 ("RUPO"), yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 21 November 2025 pukul 14.00 WIB, bertempat di PT Pyridam Farma Tbk, Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lt 12, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 21 Jakarta Selatan, dengan agenda acara RUPO:

- 1. Perubahan penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024;
- 2. Perubahan Pasal 2.1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 27 tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 02 tanggal 13 Februari 2024 ("PWA") terkait dengan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi serta pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan perubahan Pasal 2.1 PWA (apabila ada);
- 3. Perubahan informasi mengenai Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 pada bagian resital dan Pasal 1 angka 26 PWA;
- 4. Perubahan Pasal 5.3 PWA terkait dengan jangka waktu Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024; dan
- 5. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan agenda nomor 1 sampai dengan 4 di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, PENERIMA KUASA berhak untuk memberikan suara dan/atau pendapat dalam RUPO, melakukan segala perbuatan, menandatangani, dan menyerahkan segala surat-surat, akta-akta, dan dokumen-dokumen lainnya, menghadap kepada pejabat-pejabat yang berwenang, meminta dan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, sebagaimana dianggap perlu, baik, dan bermanfaat bagi kepentingan PEMBERI KUASA oleh PENERIMA KUASA dalam rangka melaksanakan hak-hak kuasanya tersebut, dan pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas tanpa dikecualikan.

Dalam rangka melaksanakan Surat Kuasa ini, PENERIMA KUASA wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuasa yang diberikan kepada PENERIMA KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini akan berakhir dalam hal, mana yang lebih dahulu:

- a. PENERIMA KUASA telah menyelesaikan Kuasa yang telah diberikan kepadanya dalam Surat Kuasa ini;
- b. PEMBERI KUASA memberikan pemberitahuan tertulis kepada PENERIMA KUASA mengenai pencabutan Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganimya surat ini.

Jakarta,	November 2025	5		
PEMBERI KUASA			PENERIMA KUASA	
	Materai Rp.10.000			
,		\	1	١

SURAT PERNYATAAN INSTITUSI

Saya/Kami yang	bertanda tangan di bawah ini :
Nama	:
No KTP	:
Jabatan	:
No KTUR	:
karena itu sah r berkedudukan d Anggaran Dasar	rsama-sama bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi dan oleh mewakili suatu perseroan terbatas yang di (" Perseroan ") sesuai Perseroan dalam Akta
Pyridam Farma T Perwaliamanatar tanggal 24 Jan Perwaliamanatar tanggal 13 Febru M.Kn, Notaris di a. hubungan ke horizontal m b. hubungan ar c. hubungan ar atau komisal d. hubungan a mengendalik e. hubungan a langsung, ok	a/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami Afiliasi / Bukan Afiliasi** dari PT Tbk. sebagai penerbit yang mana telah didefinisikan di dalam Akta Perjanjian Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 27 uari 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 02 uari 2024, yang mana seluruhnya dibuat di hadapan M. Nova Faisal,S.H., Jakarta Selatan sebagai berikut: eluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara aupun vertikal; ntara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; ntara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi ris yang sama; antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, kan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; ntara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak eh pihak yang sama; atau ntara perusahaan dan pemegang saham utama.
Demikian Surat mestinya.	Pernyataan ini Saya/Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
Jakarta, No	vember 2025
Materai 10000	
Nama : _ Jabatan : _	

^{**}Dapat dicoret salah satu